

**PEMILIHAN KETUA OSIS DALAM MEMBANGUN KESADARAN  
SISWA UNTUK MENGGUNAKAN HAK DEMOKRASI  
DI SMA NEGERI 7 BINJAI**

**Surya Wibawa**

**Dosen STKIP Budidaya Binjai**

Abstrak

Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan pekerja muda yang telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pengertian ini menitik beratkan pada interaksi antar siswa dalam pelaksanaan pemilihan osis disekolah dalam mengajarkan partisipasi aktif untuk menggunakan hak demokrasi. Identifikasi masalah dalam penelitian adalah rendahnya kesadaran siswa sebagai pemilih pemula, rendahnya pemahaman siswa dalam menggunakan hak demokrasi dan kurangnya partisipasi aktif pemilih pemula dalam pemilihan ketua osis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemahaman siswa terhadap pemilihan ketua osis dalam membangun kesadaran untuk menggunakan hak demokrasi di sma negeri 7 binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan ketua osis dalam membangun kesadaran untuk menggunakan hak demokrasi sebagai pemilih pemula pada pilkada mendatang dalam konteks berdemokrasi dan penerapan sekolah sebagai laboratorium demokrasi.

Penelitian mengambil sampel siswa SMA Negeri 7 Binjai kelas X IPA-1. Responden adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran PKn, calon ketua osis, dan perwakilan siswa yang telah melaksanakan kegiatan pemilihan osis di SMA Negeri 7 Binjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metodologi observasi, wawancara langsung dan pengisian angket. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa siswa harus mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam berdemokrasi agar mereka dapat menggunakan hak demokrasi sebagai awalan untuk menghadapi situasi dalam dunia politik, yakni pada saat pemilihan umum mendatang.

Kata kunci: Hak demokrasi, Ketua osis, Pemilih pemula.

## **I. PENDAHULUAN**

Partisipasi politik menjadi penting dalam PKn, karena partisipasi dan integrasi (secara sosial dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untuk menjadi demokrat sejati, warga negara yang aktif dan terintegrasi secara sosial tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam suatu proses sosialisasi. Singkatnya, demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara, dimana para pendidik dan politik serta institusi profesional yang terkait harus turut bertanggung jawab, hal itu diungkapkan oleh Veldhuis.

Warga negara demokratis adalah suatu tipe ideal yang memuat berbagai definisi demokrasi. Dari hal ini, perbedaan pandangan tentang demokrasi membawa tipe tersebut ke dalam perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik bagi para warga negara. Karakter warga negara ideal yang memiliki watak demokratis, *good citizen*. Terdapat beberapa indikator penyebutannya. Bila dilihat dari komponen pendidikan kewarganegaraan demokratis, ada empat komponen atau kategori pokok yang dapat dikaji secara beragam oleh para pendidik PKn dari berbagai negara.

Pembelajaran PKn bertujuan membentuk para siswa agar memiliki kompetensi sebagai warga negara yang baik dalam hal:

1. *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan);
2. *Civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan);
3. *Civic dispositions* (karakter kewarganegaraan).

Paradigma baru PKn memfokuskan diri pada upaya membentuk peserta didik sebagai masyarakat sipil dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Sehubungan dengan paradigma baru PKn, reformasi pendidikan telah mengantarkan regulasi pentingnya tenaga guru yang profesional. Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa sebagai agen pembelajaran “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU RI No. 14 Tahun 2005 Pasal 8).

Pendidikan yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang kebijakan dan tanggung jawab sebagai anggota *civil society*. Pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dalam usia seseorang dalam mengembangkan diri. Proses itu tidak hanya dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan sosial.

Pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak juga kewajibannya. Yang dimaksud pendidikan politik itu sendiri adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan

empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara.

Siswa memiliki suatu sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka mempunyai “dunia sendiri”. Dalam sistem itu terdapat kebudayaan yang mempunyai nilai-nilai, norma-norma, sikap dan bahasa sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Nilai kebudayaan itu antara lain adalah santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal informal yang mencari kesenangan dan kelompok sebaya atau *peer group* adalah penting dalam kehidupan seorang siswa, sehingga penting baginya mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Berdasarkan dengan kapasitas kebudayaan siswa, dapat dijadikan gambaran penting upaya melihat peta demokrasi dan kesadaran politik kalangan siswa di lingkungan sekolah sebagai pemilih pemula dalam suatu pemilihan langsung. Ada tiga tingkat materi yang perlu ditanamkan kurikulum pendidikan. Materi tersebut adalah penanaman hakikat pemilu yang benar, akan memunculkan motif yang kuat bagi pemilih pemula untuk mengikuti pemilu, pemahaman mengenai sistem pemilu, dan pemahaman tentang posisi tawar politik.

Pendidikan demokrasi adalah esensinya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan itu merupakan bagian dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial (PIPS). Kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi sebagai muatannya, pendidikan kewarganegaraan sebagai kendaraannya, sedangkan PIPS sebagai jembatan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan pendidikan. Secara logika pendidikan demokrasi itu

merupakan turunan dari ilmu politik yang bertujuan pendidikan yang ditopang oleh ilmu-ilmu sosial secara interdisipliner, walaupun terjadi tarik-menarik antara PIPS perlu diajarkan secara terpadu dan terpisah.

Dengan kata lain pembelajaran demokrasi di lingkup sekolah dapat meningkatkan kemampuan siswa menganalisis isu-isu demokrasi yang muncul di masyarakat, menambah kemampuan nalar siswa dalam pengetahuan kemasyarakatan, mengembangkan keterampilan berfikir, termasuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis dan kritis, mengembangkan kesadaran peran siswa dari perubahan demokrasi, membantu siswa mengakui kompleksnya dari membuat keputusan masalah demokrasi, menyediakan kesempatan siswa untuk menguji kemungkinan dampak demokrasi bagi kehidupan dan perubahan masyarakat.

Pendidikan demokrasi yang baik merupakan bagian dari pendidikan yang baik secara umum, serta membudayakan budaya demokratis dan menjadikan sekolah sebagai budaya lingkungan yang demokratis serta perlunya keterlibatansiswa dalam kegiatan masyarakat juga perlu dikembangkannya pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensinya sebagai individu dan warga negara dalam masyarakat bangsa yang demokratis.

Terdapat 4 (empat) alternatif bentuk model yang perlu dikembangkan dalam model sekolah berbasis pendidikan demokrasi. Model tersebut antara lain:

1. Perhatian yang cermat diberikan pada landasan dan bentuk-bentuk demokrasi
2. Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi diterjemahkan dalam bentuk kelembagaan dan praktik di belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Sehingga siswa akan mengetahui kekuatan dan kelemahan demokrasi
3. Adanya kurikulum yang membuat siswa mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya agar dapat menjawab persoalan kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya
4. Tersediannya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara yang ada di dunia, sehingga siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam momentum pilkada langsung menjadi landasan dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak akan kokoh apabila kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. Proses demokratisasi sejatinya menegakkan kedaulatan rakyat menjadi semu dan hanya menjadi ajang rekayasa bagi politik-politik tertentu. Format demokrasi pada arus lokal (Pilkada) meniscayakan adanya kadar dan derajat kualitas partisipasi masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah sejak tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan untuk mencari bentuk yang mencerminkan aspirasi dan sejak reformasi lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan dalam UU No. 3 Tahun 2004. Dari perubahan terakhir mengalami

perubahan yang cukup mendasar dibanding dengan peraturan pemerintah yang pernah terjadi. Bila belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang perlu dipertanyakan mungkin sistem perundang-undangan ataukah mungkin tingkat kesadaran masyarakat yang sebagian belum memahaminya.

Berikut disebutkan dalam pasal 56 ayat ( 1 ) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang kemudian diatur pendukung peraturan perundangan lain seperti Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jumlah DPT baru sebesar 4.308 jiwa itu merupakan para pemilih pemula di Kota Binjai yang sempat dihapus dari DPT Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 Juli 2014 lalu, karena tidak memenuhi syarat usia minimum untuk mengikuti proses pemungutan suara. Dalam Pilpres mendatang, jumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS) di Kota Binjai berkurang, dari 451 saat Pileg, kini di Pilpres menjadi 398 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan dan 37 kelurahan di Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Timur, Binjai Utara dan Binjai Selatan. Seluruh data DPT telah diberikan ke Panwaslu Kota Binjai dan ke seluruh partai politik yang ikut dalam Pilpres mendatang dan laporan yang masuk ke KPU Binjai terkait DPT, data yang ada di KPU Binjai sebesar 182.767 pemilih dianggap final.

Meskipun dengan jumlah 4.308 pemilih pemula bukanlah jumlah yang cukup signifikan dengan jumlah DPT Kota Binjai yang mencapai 182.767 jiwa. Namun jumlah pemilih pemula merupakan bibit-bibit pelaksana demokrasi di negeri ini dan tidak bisa dianggap remeh, karena di tangan merekalah masa depan demokrasi di Indonesia.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat mandiri, dalam arti bahwa penentuan lokasi penelitian ditentukan oleh peneliti sendiri di SMA Negeri 7 Binjai. Subjek penelitian ini adalah SMA Negeri 7 Binjai. Sedangkan responden yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran Pkn, ketua osis, dan perwakilan siswa atau ketua kelas. Penggalan informasi ini terus berkelanjutan sampai terjadi pengulangan informasi yang diterima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen atau alat penelitian digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
2. Observasi, yaitu peneliti mengadakan peninjauan dan pengamatan secara langsung tentang kegiatan pemilihan ketua osis di SMA Negeri 7 Binjai.
3. Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran PKn, calon ketua osis dan

perwakilan dari siswa di SMA Negeri 7 Binjai.

4. Studi dokumen, dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang relevan, baik dokumentasi pribadi ataupun resmi.
5. Angket, peneliti juga memberikan angket atau sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden yakni siswa.

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan;
2. Menganalisis data;
3. Merumuskan tujuan;
4. Membuat laporan;

Sebagai mana dikemukakan para ahli bahwa dalam penelitian kualitatif, setiap langkah yang dilakukan tidaklah terpisah secara tegas antara yang lain tidak terkecuali analisis data. Analisis data merupakan tahap yang tidak dapat terpisah dari langkah lain penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif.

1. Reproduksi Data

Reproduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa pembagian angket kepada siswa, mewawancarai kepala sekolah, guru mata pelajaran PKn, ketua osis, dan perwakilan siswa.

3. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan melihat keadaan

dengan cara observasi, wawancara, dan pembagian angket kepada siswa.

### **III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini di peroleh dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus pada Pemilihan Ketua Osis Dalam Membangun Kesadaran Siswa Untuk Menggunakan Hak Demokrasi Di Sma Negeri 7 Binjai.

Objek yang dijadikan dalam pengambilan data ini dari kepala sekolah, guru mata pelajaran PKn, calon ketua osis, dan perwakilan siswa. Agar penelitian ini lebih objektif dan akurat maka peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan observasi dilapangan untuk melihat secara langsung bagaimana Pemilihan Ketua Osis Dalam Membangun Kesadaran Siswa Untuk Menggunakan Hak Demokrasi Di SMA Negeri 7 Binjai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dan bertujuan untuk melukiskan fakta-fakta atau karakteristik tertentu secara faktual dan terperinci sesuai dengan fakta yang ada.

Untuk tahap analisis yang dilakukan peneliti adalah membuat daftar pertanyaan

wawancara, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui Pemilihan Ketua Osis Dalam Membangun Kesadaran Siswa Untuk Menggunakan Hak Demokrasi Di SMA Negeri 7 Binjai, peneliti melakukan berbagai tahapan.

Pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara. Kedua, melakukan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran PKn, calon ketua osis dan perwakilan siswa yang menjadi informan dari penelitian ini. Ketiga, melakukan observasi langsung kelapangan untuk melihat langsung bagaimana Pemilihan Ketua Osis Dalam Membangun Kesadaran Siswa Untuk Menggunakan Hak Demokrasi Di Sma Negeri 7 Binjai. Keempat, membagikan angket kepada siswa untuk mengetahui aktivitas pemilihan ketua osis berlangsung. Kelima menganalisis data dari hasil wawancara, observasi, dan angket yang telah dilakukan.

Pemilihan ketua osis dalam membangun kesadaran siswa untuk menggunakan hak demokrasi adalah rangkain aktivitas siswa dalam menjalankan kegiatan demokrasi disekolah dengan memotivasi siswa lainnya untuk melaksanakan kegiatan positif yang dapat respon baik di sekolah ataupun dimasyarakat dengan partisipasi yang aktif disetiap kegiatan yang ada. Sehingga memberikan dampak yang baik untuk semuanya.

Kegiatan demokrasi yang telah dilakukan siswa disekolah untuk mengajarkan siswa tentang manfaat dari menjalankan atau mengikuti pelaksanaan demokrasi dan agar siswa mengerti tentang arti demokrasi sebenarnya. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah Dari sudut

bahasa (*etimologis*), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa *demos-cratos* atau *demos-cratein* demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep klasik demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh banyak pihak “*rule by the many*” atau suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan rakyat “*rule by the people*”. Demokrasi berfokus pada dua hal penting yang berkaitan, yakni *representasi* (perwakilan) dan partisipasi. *Representasi* menunjukkan pertimbangan pada kepentingan mayoritas atau orang banyak, sedang partisipasi menunjukkan keinginan dan keikutsertaan publik pada aktivitas politik.

Pada pemilihan osis ini tidak hanya sekedar pemilihan biasa tetapi dapat membantu siswa dalam berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan dan menyadarkan siswa dalam menggunakan hak demokrasinya sebagai pemilih pemula untuk mengeluarkan pendapatnya pada setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Pemilihan ini juga dapat menjadi acuan atau pedoman bagi siswa dalam menghadapi pemilihan umum dimasa yang akan datang. Yang dimaksud pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan pekerja muda yang telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan eksekutif maupun legislatif.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan ketua osis yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 binjai untuk menyadarkan siswa agar dapat menggunakan hak demokrasinya sebagai awalan untuk bekal mereka menghadapi situasi dalam dunia politik, yakni pada saat pemilihan umum mendatang.
2. Pemilihan ketua osis dalam membangun kesadaran siswa untuk menggunakan hak demokrasi adalah rangkain aktivitas siswa dalam menjalan kegiatan demokrasi disekolah dengan memotivasi siswa lainnya untuk melaksanakan kegiatan positif yang mendapat respon baik di sekolah maupun dimasyarakat dengan partisipasi yang aktif disetiap kegiatan yang ada. Sehingga memberikan dampak yang baik untuk semuanya.

##### **B. Saran**

Sehubungan dengan pokok bahasan penelitian ini dan berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran-saran yaitu:

1. Perlu diberikan sosialisasi kesadaran berpolitik bagi siswa sebagai pemilih pemula dalam pemilihan dilingkup sekolah, dan masyarakat sekitar.
2. Perlu mengembangkan hasil penelitian dengan melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan sistematis, sehingga diperoleh manfaat yang lebih optimal.
3. Pemilihan ketua osis harus tetap berjalan di sekolah agar siswa lebih mempunyai kesadaran demokrasi atau jiwa sosial yang tinggi untuk menggunakan hak demokrasinya secara langsung.
4. Untuk guru, khususnya guru mata pelajaran PKn agar dapat memberikan motivasi pada siswa untuk lebih menghargai nilai demokrasi agar siswa

dapat menggunakan hak demokrasiya dengan baik lagi.

5. Untuk peneliti lainnya disarankan untuk membantu mengembangkan potensi siswa dalam berdemokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mirriam., *Edisi Revisi Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Februari, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Cangara, Hafied., *Komunikasi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harian. [analisadaily.com/sumut/news/](http://analisadaily.com/sumut/news/) diakses tanggal 15 April 2016.
- [id.wikipedia.org/wiki/Hak](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak). diakses tanggal 29 September 2016
- Jurnal PKn Progresif*, Vol.1, No. 1, Juni. diakses tanggal 26 Juni 2016., 2006.
- Jurnal UNIERA* Volume 2 Nomor 2; ISSN 2086-0404. diakses tanggal 27 Juni 2016.
- Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya “Terbit Terang”, 2002.
- Nasriaika [1125.wordpress.com](http://1125.wordpress.com). diakses tanggal 10 Agustus 2013.
- Poerwoparminta W.J.S., Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya., Februari, 2010.
- Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. [www.lahiya.com/pengertian-demokrasi](http://www.lahiya.com/pengertian-demokrasi), diakses tanggal 12 Juli 2016



